

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Migrasi pekerja dari Indonesia ke Malaysia telah menjadi fenomena yang berlangsung puluhan tahun. Motivasi utama keberangkatan tersebut umumnya didasari oleh keterbatasan ekonomi, minimnya kesempatan kerja, serta imajinasi tentang kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Dalam konteks ini, keputusan untuk bermigrasi bukan semata hasil dari faktor struktural, tetapi juga ditentukan oleh persepsi individu terhadap peluang dan tantangan yang mereka bayangkan. Persepsi ini terbentuk dari pengalaman sosial, informasi yang diperoleh, serta cara mereka memahami realitas sosial dan ekonomi di negara asal dan tujuan.

Fenomena migrasi tenaga kerja internasional menjadi salah satu strategi bertahan hidup masyarakat dari negara berkembang dalam menghadapi keterbatasan ekonomi (Hugo, 2002). Malaysia merupakan negara tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia, khususnya dalam sektor informal seperti pekerjaan rumah tangga, konstruksi, dan perkebunan (IOM, 2023). Berdasarkan data dari IOM, terdapat lebih dari 1,6 juta pekerja migran Indonesia atau setara dengan 50,03% dari total pekerja migran Indonesia, yang menunjukkan bahwa Malaysia adalah negara penerima migran terbesar dari Indonesia yang bekerja di Malaysia, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi (IOM, 2023).

Keputusan untuk menjadi pekerja migran ke luar negeri tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendorong (push) dari negara asal dan faktor penarik (pull) dari negara tujuan (Lee, 1966). Secara umum, dalam studi migrasi, konsep push-pull digunakan untuk menjelaskan migrasi sebagai hasil dari dorongan (push) di negara asal dan tarikan (pull) di negara tujuan. Di Indonesia, faktor "push" seperti kemiskinan, ketimpangan pembangunan desa-kota, dan keterbatasan lapangan kerja menjadi pendorong

utama (Ardiyanto & Rijanta, 2012). Di Indonesia, faktor pendorong seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan minimnya akses kesejahteraan mendorong individu untuk mencari peluang di luar negeri (Raharto, 2007). Sementara itu, Malaysia dianggap menawarkan “pull” yang upahnya lebih tinggi, permintaan tenaga kerja yang tinggi, dan kemudahan akses kerja mendorong terbentuknya persepsi bahwa bekerja di luar negeri akan membawa kehidupan yang lebih baik (Shrestha, 2022).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori migrasi. Dalam kerangka teori ekonomi neoklasik, migrasi dipandang sebagai bentuk rasionalisasi individu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan berpindah dari daerah dengan peluang ekonomi terbatas (Indonesia) ke daerah dengan potensi pendapatan yang lebih besar (Malaysia) (Rahmadana, 2020). Sementara itu, teori sistem dunia menyoroti bagaimana ketimpangan struktural antara negara pusat dan negara perifer turut menciptakan arus migrasi dari negara berkembang ke negara yang lebih maju secara ekonomi (Benteng, 2021). Dalam konteks ini, Malaysia sebagai negara yang lebih berkembang menarik arus migrasi dari Indonesia, yang berada dalam posisi lebih lemah secara ekonomi dalam sistem global.

Namun, setelah berada di Malaysia, situasi sering kali tidak sesuai dengan ekspektasinya. Banyak PMI menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti kekerasan fisik, pelecehan verbal, jam kerja panjang tanpa istirahat, gaji yang tidak dibayarkan, hingga ancaman deportasi (Rustam, Fitriani, & Hidayati, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah tiba di negara tujuan, para PMI tidak hanya menghadapi kondisi kerja yang keras, tetapi juga minimnya perlindungan hukum yang memadai (International Labour Organization [ILO], 2021). Dalam situasi ini, para pekerja mulai membentuk persepsi baru, yakni bahwa Malaysia bukan lagi tempat yang aman dan menjanjikan, sehingga melarikan diri dipandang sebagai pilihan yang lebih aman (Toyibah, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa di balik angka yang terus bertambah, terdapat realitas sosial yang memprihatinkan. Banyak PMI yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan baik dari majikan maupun agen tenaga kerja (Palmer, 2016). Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia (Kemnaker), Singapura memiliki jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapat pelayanan perlindungan paling banyak, yakni 10.270 orang, sementara Malaysia hanya memiliki 58 orang PMI yang mendapat perlindungan. Hal ini menunjukkan kesenjangan signifikan dalam sistem perlindungan pekerja migran Indonesia, terutama di Malaysia, yang masih rentan terhadap eksploitasi, kekerasan fisik dan seksual, serta perdagangan manusia. Penerbitan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja (Kemnaker, 2024).

Perubahan persepsi ini penting untuk dianalisis karena ia tidak hanya mempengaruhi keputusan awal untuk migrasi, tetapi juga mempengaruhi keputusan lanjutan seperti melarikan diri dari tempat kerja (Jones, 1991). Menurut teori persepsi, individu mengambil keputusan berdasarkan bagaimana mereka memaknai realitas, bukan realitas itu sendiri (Elder, Paul, & Bartell, 2012). Dalam konteks migrasi, persepsi para pekerja dibentuk oleh keterbatasan informasi, pengalaman sosial, dan pengetahuan yang subjektif tentang tempat tujuan (Chan & Pereira, 2021). Misalnya, banyak calon pekerja migran yang hanya memperoleh informasi dari media sosial atau cerita tetangga, sehingga mereka membentuk ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap kehidupan di luar negeri (Sukamdi, Brownlee, & Haris, 2004).

Sebaliknya, mereka yang memiliki akses informasi dan pendidikan yang lebih baik akan cenderung membentuk persepsi yang lebih realistis dan mampu mengantisipasi risiko-risiko migrasi (Ruhs, 2013). Oleh karena itu, persepsi berperan sebagai elemen kognitif dan emosional dalam pengambilan

keputusan migrasi, termasuk keputusan untuk melarikan diri dari tempat kerja ketika merasa terancam (Koser, 2010).

Situasi yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia seringkali lebih buruk daripada yang dilaporkan. Selain penyalahgunaan dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis, pekerja migran Indonesia juga menghadapi kondisi kerja yang buruk, seperti jam kerja yang panjang tanpa kompensasi yang memadai, serta kekerasan fisik dan seksual. Status mereka sebagai pekerja asing membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan di negara tujuan. Mayoritas publik Malaysia atau sekitar 69 persen, berpendapat bahwa negara harus mempersulit pekerja migran untuk masuk dan bekerja (Utama, 2022). Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap pekerja migran, dengan banyak yang menganggap mereka sebagai ancaman terhadap budaya dan warisan negara Malaysia, serta menyatakan bahwa mereka memiliki etika kerja yang buruk dan lebih cenderung melakukan kejahatan.

Selain itu, pekerja migran yang melarikan diri dari majikan sering kali terjatuh dalam situasi yang lebih buruk, seperti menjadi korban perdagangan manusia atau menjadi lebih rentan terhadap kekerasan lebih lanjut. Dalam banyak kasus, mereka terjebak dan tidak mengerti ke mana harus pergi untuk mencari perlindungan. Di sinilah peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) menjadi sangat penting, namun keberadaannya sering kali terbatas dalam memberikan bantuan yang memadai. Pekerja migran yang terisolasi, tidak memiliki akses informasi tentang hak-hak mereka, dan terikat oleh kontrak yang sering kali tidak adil atau bahkan ilegal, sering kali merasa terjebak dalam situasi yang sulit (IOM, Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia, 2010).

Keputusan untuk melarikan diri bukanlah hal yang diinginkan oleh banyak PMI, namun sering kali menjadi pilihan terakhir yang terpaksa diambil sebagai akibat dari ketidakmampuan mereka untuk bertahan dalam

kondisi kerja yang mengancam keselamatan dan martabat mereka. Data yang dihimpun oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan bahwa mayoritas pekerja migran Indonesia di Malaysia memilih untuk melarikan diri setelah mengalami tekanan psikologis dan fisik yang berlarut-larut. Mereka sering merasa terisolasi, tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai hak-hak mereka, dan terikat oleh kontrak yang sering kali tidak adil atau bahkan ilegal (Rustam, 2022). Hal ini memperburuk kondisi mereka dan menambah beban psikologis serta sosial yang mereka hadapi. Oleh karena itu, meskipun terdapat instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan hak-hak pekerja migran, seperti Konvensi ILO No. 97 (1949) dan Konvensi Migran 1990, pelaksanaan dan implementasi hukum tersebut seringkali tidak memenuhi harapan (Kania, 2024).

Fenomena ini menyoroti pentingnya memahami lebih dalam mengenai persepsi PMI terhadap situasi yang mereka hadapi, terutama alasan-alasan yang mendasari keputusan mereka untuk melarikan diri. Persepsi ini sangat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan perlindungan yang ada dapat memenuhi kebutuhan mereka (Situmorang, 2021). Tidak hanya itu, persepsi tersebut juga bisa memberikan pandangan terkait bagaimana seharusnya sistem perlindungan pekerja migran, baik di Indonesia maupun Malaysia, diubah atau diperbaiki untuk menghindari terjadinya eksploitasi lebih lanjut.

Rendahnya persepsi pekerja migran terhadap efektivitas sistem perlindungan pekerja migran, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari otoritas Malaysia, menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka tidak melaporkan kekerasan dan memilih melarikan diri (BP2MI, 2022). Padahal secara formal, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjamin hak atas keamanan dan perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap bantuan hukum dan perlindungan konsuler sering kali sulit diakses oleh PMI yang menghadapi kekerasan (ILO, 2021).

Lebih lanjut, tidak semua pekerja migran yang mengalami kekerasan berasal dari jalur nonprosedural. Bahkan pekerja resmi yang berangkat melalui prosedur legal tetap menghadapi risiko yang sama besar, menunjukkan bahwa status legalitas tidak serta-merta menjamin perlindungan (Rustam et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran tidak bisa hanya dilihat dari sisi regulasi, tetapi juga dari sudut pandang persepsi mereka terhadap efektivitas perlindungan yang ada.

Dalam kondisi tersebut, melarikan diri bukan semata-mata tindakan ilegal atau pelanggaran kontrak kerja, tetapi dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap situasi yang mereka anggap membahayakan secara fisik dan psikologis (Toyibah, 2022). Oleh sebab itu, pendekatan yang menempatkan persepsi sebagai variabel utama perlu dikembangkan dalam studi mengenai pekerja migran.

Disamping itu, dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di Malaysia turut mempengaruhi kondisi pekerja migran. Ketergantungan ekonomi terhadap PMI dari sektor informal yang terus meningkat membuat Malaysia menghadapi tantangan dalam mengatur perlindungan terhadap mereka (Najmi, 2023). Beberapa kebijakan yang ada sering kali tidak cukup memadai untuk menanggulangi masalah-masalah yang timbul, seperti masalah legalitas kontrak kerja dan sistem penempatan yang kurang transparan. Hal ini membuat pekerja migran, terutama yang bekerja di sektor domestik, rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi (Antomarta, 2022).

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah ada, data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari pekerja migran yang berhasil mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Banyak dari mereka yang melarikan diri karena kurangnya pemahaman tentang prosedur perlindungan yang tersedia (Sastriyani, 2016). Hal ini semakin memperburuk situasi mereka, terutama dalam konteks ketidakpastian hukum yang mengancam keberadaan mereka di negara asing. Dengan demikian, penting untuk menyelidiki lebih lanjut

faktor-faktor yang mendorong pekerja migran untuk melarikan diri dan bagaimana persepsi mereka terhadap perlindungan yang diberikan oleh negara mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai alasan-alasan tersebut dan memahami sejauh mana kebijakan yang ada memberikan perlindungan yang nyata. Penelitian ini juga berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah Indonesia dan Malaysia seharusnya berkolaborasi dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan manusiawi bagi pekerja migran.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keputusan pekerja migran untuk melarikan diri seringkali dipengaruhi oleh kurangnya informasi mengenai hak-hak mereka dan ketidakmampuan untuk mengakses bantuan hukum yang tepat. Penelitian Nurhafiz Hidayat dkk. (2025) mengkaji perlindungan hukum PMI di Arab Saudi, menyoroti implementasi perlindungan hukum yang dinilai belum efisien, termasuk kurangnya pelatihan dan pengawasan agen. Penelitian Tommy Effendi & Atikah Rahmi (2024) fokus pada hambatan pendidikan anak-anak PMI di Malaysia, dengan masalah akses pendidikan yang terhambat status keimigrasian orang tua mereka. Sedangkan penelitian Ismah Rustam dkk. (2022) mengidentifikasi masalah perdagangan orang di kalangan pekerja migran asal NTB, menekankan perlunya kerjasama pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Ketiga penelitian ini memberikan gambaran tentang eksploitasi dan tantangan pekerja migran di luar negeri, baik dari aspek hukum, sosial ekonomi, maupun perlindungan.

Melihat pentingnya masalah ini, penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi pekerja migran Indonesia, tetapi juga untuk mengidentifikasi celah-celah dalam sistem perlindungan yang ada. Hal ini akan memberikan dasar bagi pembentukan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani permasalahan pekerja migran, serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara lebih sistematis dan terstruktur.

Meskipun ada sejumlah penelitian terkait isu pekerja migran Indonesia, sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek hukum atau sosial ekonomi secara umum, tanpa menyelidiki persepsi pribadi pekerja migran terhadap perlindungan yang diberikan atau alasan yang mendorong mereka untuk melarikan diri. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan fokus yang lebih tajam pada persepsi pekerja migran dan kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan perlindungan.

Penelitian ini pun bertujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi pekerja migran Indonesia terhadap kondisi kerja dan perlindungan di Malaysia memengaruhi keputusan mereka untuk melarikan diri. Dengan menekankan dimensi persepsi, penelitian ini tidak hanya melihat migrasi dari sisi ekonomi dan hukum, tetapi juga dari sudut pandang subjektif para aktor migran sendiri. Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata pekerja migran di lapangan (Hugo, 2002).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk menelaah secara spesifik bagaimana persepsi pekerja migran Indonesia terhadap lingkungan kerja dan sistem perlindungan memengaruhi keputusan mereka untuk melarikan diri dari tempat kerja di Malaysia sebagai berikut:

“Bagaimana persepsi PMI terhadap situasi dan kondisi lingkungan kerja di Malaysia mempengaruhi keputusan mereka untuk kabur dari negara tujuan (Malaysia) ?”

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merangkai tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana persepsi pekerja migran Indonesia terhadap kondisi kerja dan sistem perlindungan di Malaysia memengaruhi keputusan mereka untuk melarikan diri dari tempat kerja. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman kerja para pekerja migran, tetapi juga untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dimaknai secara subjektif dan emosional oleh para pekerja sebagai individu yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda.

Dengan menjadikan persepsi sebagai variabel utama, penelitian ini berupaya membongkar dimensi internal dari proses pengambilan keputusan migrasi, khususnya keputusan untuk melarikan diri, yang selama ini lebih banyak dijelaskan dari pendekatan struktural seperti pelanggaran hukum, status legalitas, atau lemahnya perlindungan negara. Pendekatan ini penting karena keputusan melarikan diri tidak semata-mata merupakan akibat langsung dari kondisi objektif yang buruk, melainkan merupakan hasil dari proses persepsi atas pengalaman, ancaman, dan harapan yang tidak terpenuhi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara realitas objektif di lapangan dengan respon subjektif para pekerja migran yang diwujudkan dalam bentuk persepsi mereka terhadap risiko dan perlindungan. Pemahaman ini penting untuk menjelaskan mengapa sebagian pekerja memilih untuk bertahan dalam kondisi buruk,

sementara yang lain memilih untuk melarikan diri, meskipun berada dalam situasi yang serupa secara struktural.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk eksploitasi atau pelanggaran hak yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia.
- 2) Untuk menggambarkan persepsi pekerja migran Indonesia terhadap kondisi kerja dan sistem perlindungan di negara tujuan.
- 3) Untuk menganalisis hubungan antara persepsi pekerja migran dengan keputusan untuk melarikan diri dari tempat kerja.
- 4) Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi pekerja migran terhadap pengalaman kerja dan perlindungan hukum di Malaysia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur yang dapat memperluas kajian hubungan internasional khususnya dalam studi migrasi tenaga kerja internasional, melalui pendekatan yang berfokus pada persepsi individu pekerja migran sebagai aktor utama dalam proses migrasi. Pendekatan ini penting untuk mengisi kekosongan dalam kajian yang selama ini cenderung menekankan pada aspek makro-struktural seperti kebijakan migrasi, sistem hukum, atau peran lembaga negara, sementara aspek subjektif dari individu pekerja sering kali diabaikan. Dengan memusatkan perhatian pada persepsi sebagai variabel utama, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang menempatkan pengalaman, interpretasi, dan penilaian pribadi pekerja migran terhadap kondisi kerja dan perlindungan sebagai dasar analisis. Kajian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori migrasi dengan mengintegrasikan pendekatan kognitif dalam memahami dinamika

keputusan melarikan diri, termasuk bagaimana persepsi terhadap risiko, ketidakamanan, dan kekecewaan terhadap sistem perlindungan dapat menjadi pemicu keputusan ekstrem. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat mendorong peneliti-peneliti lain untuk mengembangkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori persepsi, psikologi sosial, dan hubungan internasional dalam menelaah fenomena migrasi global.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memperoleh hasil penelitian yang dapat menjadi landasan penting bagi pemerintah Indonesia, khususnya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan RI di Malaysia dalam merancang kebijakan dan mekanisme perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan persepsi pekerja migran di lapangan. Penelitian ini menyoroti bahwa keputusan melarikan diri bukanlah sekadar bentuk pelanggaran kontrak kerja, melainkan respons terhadap situasi kerja yang dirasakan mengancam secara fisik maupun psikologis, serta ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem perlindungan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap persepsi PMI menjadi penting dalam perbaikan sistem komunikasi, penyediaan informasi migrasi yang realistis sebelum keberangkatan, serta penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi yang lebih manusiawi dan adaptif. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan oleh organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan komunitas migran sebagai dasar advokasi yang lebih berbasis pada pengalaman dan pemaknaan individu pekerja, bukan semata-mata data statistik atau kerangka regulatif. Dengan demikian, penelitian ini dapat berperan dalam mendorong kebijakan perlindungan pekerja migran yang lebih partisipatif, berbasis bukti, dan berpihak pada persepsi dan suara pekerja sebagai subjek utama

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab pertama ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Latar belakang masalah menggambarkan fenomena pekerja migran Indonesia yang menghadapi tantangan serius terkait eksploitasi dan kekerasan di Malaysia, serta perlunya penelitian untuk memahami persepsi mereka terhadap perlindungan yang ada. Rumusan masalah dalam bab ini akan memfokuskan penelitian pada alasan yang mendasari keputusan PMI untuk melarikan diri dan mencari perlindungan serta mengkaji bentuk perlindungan yang diberikan oleh kedua negara terkait. Bab ini juga menyajikan tujuan penelitian, yang menekankan pada analisis mendalam terhadap dinamika ini dan manfaat penelitian bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini akan menyajikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk teori migrasi, pelanggaran hak asasi manusia, serta teori-teori tentang perlindungan pekerja migran. Selain itu, akan dibahas pula penelitian-penelitian terdahulu yang membahas isu-isu serupa, baik di tingkat regional maupun internasional, dengan tujuan untuk menunjukkan perkembangan literatur dan identifikasi gap penelitian yang ada. Tinjauan pustaka ini juga bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ketiga ini akan menguraikan desain penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data utama. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pekerja migran Indonesia yang melarikan diri dari majikan mereka di Malaysia, serta

pihak-pihak terkait seperti BP3MI dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran. Proses pengumpulan data akan melibatkan wawancara dengan PMI, perwakilan BP3MI, dan pejabat pemerintah Indonesia dan Malaysia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang akan mengidentifikasi pola dan tema dari wawancara yang diperoleh.

BAB IV: Hasil dan Analisis

Bab keempat akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan pekerja migran, perwakilan BP3MI, dan pejabat pemerintah. Analisis hasil penelitian akan mengidentifikasi persepsi PMI terkait alasan mereka melarikan diri, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, serta bagaimana mereka melihat bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Bab ini juga akan membahas temuan terkait efektivitas kebijakan perlindungan yang ada, serta tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran dalam mengakses perlindungan hukum.